

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan perekonomian masih menjadi bahasan utama dengan melihat masih banyaknya masyarakat miskin di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, terjadi kenaikan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022. Terdapat 9,57% dari jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebagai penduduk miskin (BPS Indonesia, 2023). Jumlah penduduk yang terus bertambah berdampak pada angka kemiskinan yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Pada tahun 2020 kondisi perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan munculnya wabah Covid-19 dengan tingkat persentase pada triwulan pertama mencapai 2.97% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5.07% (BPS Indonesia, 2020). Terjadi kontraksi pertumbuhan data pada triwulan ketiga sebesar 3,49 %, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% (BPS Indonesia, 2020). Hal ini tentunya berdampak pada tingkat pengangguran dan angka kriminalitas yang semakin meningkat.

Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam mendorong percepatan dan efektivitas melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter (Damayanti, 2021). Pemerintah melakukan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi yang mengalami penurunan. Hal ini tercermin dalam

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mengambil tema tentang “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” (Kementerian Keuangan RI, 2021). Peningkatan ekonomi menjadi arah kebijakan APBN tahun 2021 sehingga diharapkan perekonomian mampu untuk tumbuh dan meningkat di tahun mendatang.

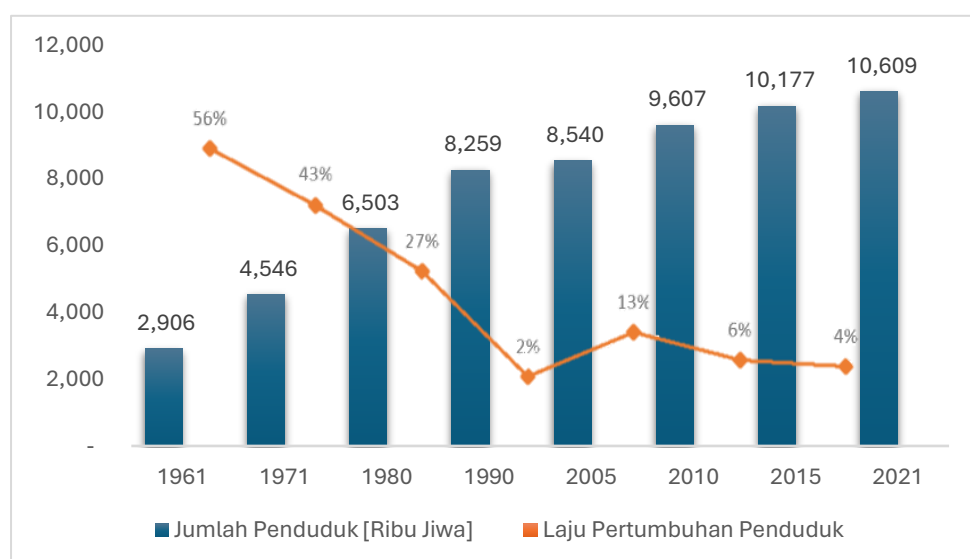
Pemerintah memberikan fokus dan perhatiannya pada Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu langkah penting yang harus diperhatikan (Kementerian Keuangan RI, 2022). Pengembangan UMKM di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan melalui pemberdayaan oleh pemerintah. UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara terutama dalam memperbaiki kondisi perekonomian. Peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan kemiskinan sangat dibutuhkan.

Penanganan harus dilakukan secara matang dan serius untuk dijalankan seperti dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM. Pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan terkait peningkatan sektor UMKM sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Seperti bantuan dalam pelaksanaan program PEN untuk UMKM diberikan dalam memberikan subsidi bunga untuk membantu meningkatkan dan membantu proses berjalannya usaha (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Selain itu pemberian pembiayaan UMKM dan koperasi

melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan dan menambah modal UMKM (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan salah satu daerah yang sangat berkepentingan dalam melakukan peningkatan aktivitas dunia usaha yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengembangan pelaku usaha terutama UMKM sangat diperlukan keberadaannya dalam menunjang perekonomian negara. DKI Jakarta menjadi wilayah yang berperan sebagai pusat dari berbagai sektor termasuk perkantoran, perdagangan, dan pemerintahan menyebabkan banyak masyarakat untuk mencari penghasilan dan kehidupan di Jakarta. Jumlah penduduk yang banyak menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. Peran serta pemerintah dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sangat diperlukan terutama di masa perkembangan era digital saat ini.

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta



Sumber: BPS DKI Jakarta (2022)

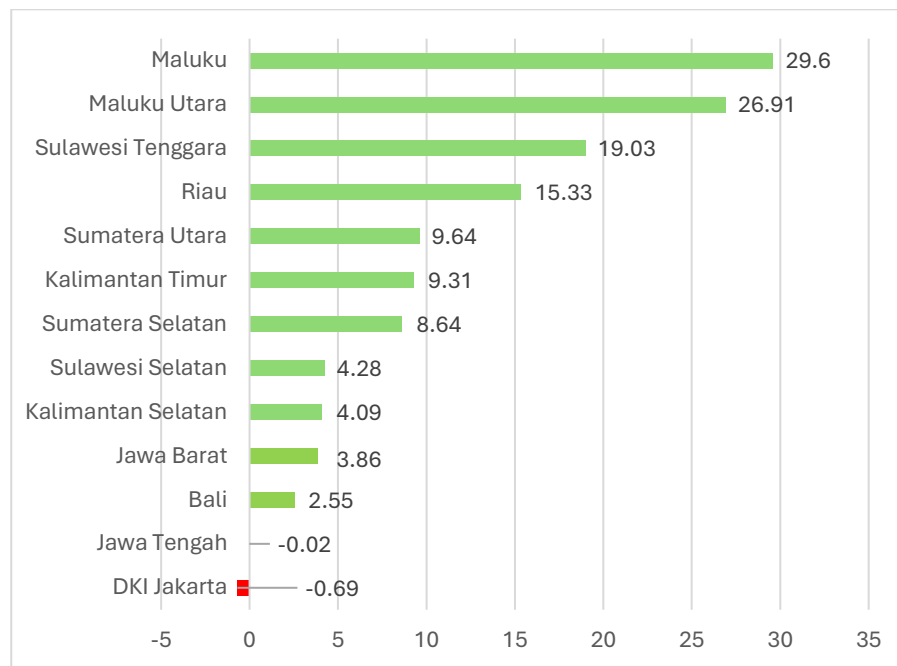
Berdasarkan Grafik 1.1 di atas, jumlah penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 1961 sampai 2021. Jumlah penduduk yang terus bertambah dapat berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat salah satunya kemiskinan. Peran serta pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang ada dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan. Besarnya jumlah penduduk ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah melalui pengembangan UMKM sekaligus dapat menjadi peluang pasar bagi usahawan dalam mendirikan usaha. Darwanto (2008:22) (dalam Nirwana dkk., 2017) menjelaskan alasan kuat mengapa UMKM perlu dikembangkan di Indonesia, yaitu karena mampu menyerap banyak tenaga kerja serta pemeratakan distribusi pembangunan dan pendapatan.

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Banyak sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan sehingga memaksa pelaku usaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berdampak pada angka pengangguran sekaligus kemiskinan di DKI Jakarta menjadi semakin meningkat. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 4,53% dan 2021 sebesar 4,72% atau 502 ribu jiwa dari total penduduk Ibu Kota (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat mencapai 8,51% pada tahun 2021 (Kusnandar, 2021).

Melihat angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, pemerintah didorong untuk terus mampu mengatasi permasalahan yang timbul, salah satunya melalui peran serta UMKM. UMKM berperan dalam memberikan

kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebanyak 61,97% dari total PDB nasional atau sebesar Rp8.573 triliun pada tahun 2020 (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus mencapai 97% sehingga memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah pengangguran (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Wirausaha-wirausaha memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha.

Grafik 1.2 Pertumbuhan Wirausaha di Indonesia Tahun 2021



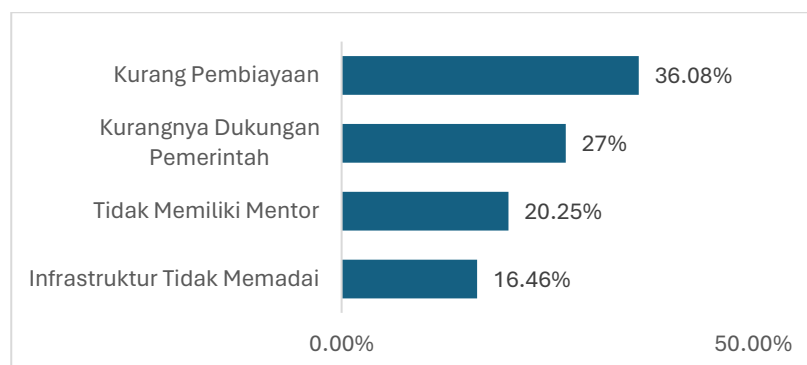
Sumber : (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021)

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Grafik 1.2, pertumbuhan wirausaha di DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,69%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan dan kemuduran pertumbuhan wirausaha yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun tersebut. Wirausaha memiliki peranan dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan pelaku UMKM melalui berbagai program kebijakan yang

dijalankan. Scarborough dan Zimmerer (1993) (dalam Hastuti dkk., 2020) menjelaskan wirausahawan sebagai seseorang yang dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk mengembangkan usahanya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ketika ada hambatan lagi. Wirausaha dalam menjalankan perannya, tidak menutup bagi pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala yang dialami selama berjalannya usaha.

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang dijalankan tidak menutup adanya hambatan terutama dalam proses pengembangan usaha. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM menjadi hambatan dalam proses pengembangan usaha yang sudah berjalan. Pengembangan usaha bagi pelaku UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang menghambat berjalannya usaha. Ketidak siapan wirausaha dalam menghadapi permasalahan menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha sehingga usaha tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pendapatan usaha menjadi faktor utama yang menjadi perhatian bagi pelaku UMKM maupun pemerintah bagaimana nilai usaha meningkat atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Mariam & Yuliani, 2022), modal usaha, pelatihan, dan teknologi memberikan pengaruh terhadap pendapatan.

Grafik 1.3 Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia



Sumber : (Ahdiat, 2022)

Berdasarkan Grafik 1.3, kendala yang dialami pelaku UMKM paling banyak disebabkan karena pembiayaan yang masih kurang. Modal menjadi salah satu unsur-unsur peran penting dalam berjalannya usaha, terutama dalam pengembangan usaha yang lebih maksimal. Permasalahan lain yang dihadapi pelaku UMKM, yaitu masih kurangnya dukungan dari pemerintah, tidak adanya mentor selama berjalannya usaha, dan infrastruktur yang kurang memadai untuk menjalankan usaha. Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengatakan adanya permasalahan utama para pelaku UMKM, terkait dengan pengalaman yang masih terbatas dan kurangnya pendanaan sehingga berdampak terhadap sulitnya untuk berkompetisi dan peningkatan penjualan (Ariesta, 2021). Penelitian yang dilakukan (Mariam & Yuliani, 2022) menambahkan bahwa para pelaku UMKM belum memahami strategi pemasaran, pengelolaan pengembangan usaha, hingga modal yang masih terbatas menyebabkan terhambatnya peningkatan usaha.

Banyak usaha yang tidak dapat bertahan lama karena sumber daya manusia yang kurang kompeten terhadap kurangnya pengetahuan serta pengalaman menjadi usaha yang dijalankan. Perkembangan era digital menjadi peluang sekaligus penghambat karena masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Saat ini pelaku UMKM masih menemukan banyak permasalahan dalam pengembangannya. UMKM masih terus dikembangkan keberadaannya oleh pemerintah sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) hingga tahun 2022 mencapai 64,2

juta (Kementerian Keuangan RI, 2022), sedangkan, di DKI Jakarta pada tahun 2022 mencapai 1.061.968 UMKM (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah UMKM DKI Jakarta Tahun 2022

No.	Wilayah	Jumlah UMKM	Persentase Jumlah UMKM
1	Kepulauan Seribu	3.210	0,3%
2	Kota Administrasi Jakarta Utara	197.179	18,57%
3	Kota Administrasi Jakarta Barat	272.761	25,68%
4	Kota Administrasi Jakarta Pusat	138.304	13,02%
5	Kota Administrasi Jakarta Timur	240.512	22,65%
6	Kota Administrasi Jakarta Selatan	210.002	19,78%
	Jumlah	1.061.968	100%

Sumber: (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jumlah UMKM di DKI Jakarta mencapai 1.061.968 atau sebesar 1,65% dari jumlah UMKM di Indonesia. Angka ini menunjukkan jumlah UMKM di DKI Jakarta masih sedikit sebagai daerah yang berperan sebagai pusat perekonomian. Perlu adanya usaha dari pemerintah dalam ikut serta menambah pelaku UMKM. Pengembangan UMKM adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan nilai usaha dengan melakukan kerjasama bersama pihak swasta dan masyarakat melalui pemberian bantuan baik dari ekonomi maupun sumber daya. UMKM memerlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang yang tersedia untuk peningkatan usaha. Proses pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui berbagai langkah di antaranya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, melakukan inovasi produk, mengembangkan promosi, dan pemanfaatan teknologi.

Menciptakan iklim usaha yang kondusif sangat mendukung proses pengembangan UMKM dengan menjaga budaya usaha positif sehingga tenaga kerja mampu menjalankan usaha dengan semangat. Pemberian keamanan dan

ketentraman bagi pelaku usaha dari pemerintah, serta penyederhanaan proses perizinan usaha. Inovasi produk menjadi salah satu langkah yang juga dilakukan untuk memaksimalkan penjualan serta menarik minat beli pelanggan. Pengembangan UMKM tidak terlepas dari kegiatan promosi sehingga dapat menjangkau pasar lebih luas. Pelaku usaha dapat mengembangkan promosi dengan mengikuti kemajuan zaman melalui pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan produk yang dihasilkan. Penggunaan teknologi akan memudahkan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha melalui promosi sehingga jangkauan pasar lebih luas.

Pemerintah Provinsi DKI melakukan pemberdayaan masyarakat pada sektor UMKM melalui peluncuran program Jakpreneur yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Program pengembangan UMKM yang diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta menjadi salah satu peluang dalam meningkatkan usaha dan taraf perekonomian. Pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM memerlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, terutama pemerintah sebagai penggerak masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Jakpreneur sebagai salah satu cara pemerintah memberikan kontribusinya untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Jakpreneur sebagai program pemberdayaan menjadi upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang lebih mandiri. Djohani (2003) (dalam Kholqi, 2020) mendefinisikan

pemberdayaan adalah menciptakan keseimbangan melalui pemberian daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah sekaligus mengurangi kuasa pada pihak yang berkuasa. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dalam pelaksanaannya untuk menghasilkan pelaku UMKM yang lebih berwawasan dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang dijalankan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam usahanya untuk mengembangkan UMKM menghadirkan program Jakpreneur bagi pelaku UMKM. Jakpreneur merupakan fasilitas yang diberikan kepada UMKM melalui kegiatan kolaborasi antara kewirausahaan, seperti *start-up*, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan (Jakpreneur DKI Jakarta, 2021). Jakpreneur adalah fasilitas yang diberikan Pemprov DKI Jakarta melalui proses kolaborasi antar K/L, dunia usaha, dan masyarakat yang berbentuk kerjasama jangka panjang dalam rangka mengembangkan kemandirian berusaha. Jakpreneur merupakan salah satu bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta dengan berlandaskan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020 yang menjadi penyempurnaan dari standarisasi kerja pada program OKE OCE pada tahun 2018. OKE OCE sendiri adalah program yang di jalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk memberikan dorongan dan manfaat bagi wirausahawan (Supriyatin, 2019).

Jakpreneur menjadi penyempurnaan program OKE OCE atau *One Kecamatan One Center for Entrepreneurship* melalui penyusunan struktur dan program yang lebih tertata. Jakpreneur memiliki kegiatan utama berupa 7P yang terdiri dari Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan keuangan,

dan Permodalan kepada UMKM binaan Jakpreneur (Jakpreneur DKI Jakarta, 2021). Program Jakpreneur dijalankan oleh 6 SKPD yang telah ditentukan salah satunya yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI sebagai salah satu SKPD yang berperan sebagai koordinator penyelenggara Jakpreneur. Pempek Cixni merupakan salah satu UMKM binaan Jakpreneur yang berhasil memperoleh pendapatan 2x lipat lebih tinggi sebelum bergabung dengan Jakpreneur (Jakpreneur DKI Jakarta, 2021).

Tabel 1.2 UMKM Binaan Jakpreneur DKI Jakarta

No.	Kota Administrasi	Jumlah	Persentase
1.	Kepulauan Seribu	97	0,21%
2.	Jakarta Utara	6.654	14,19%
3.	Jakarta Barat	6.417	13,68%
4.	Jakarta Pusat	11.908	25,39%
5.	Jakarta Timur	10.945	23,33%
6.	Jakarta Selatan	10.882	23,20%
TOTAL		46.903	100%

Sumber: (LKIP Dinas PPKUKM, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, jumlah UMKM binaan Jakpreneur ini hanya sebesar 4,4% dari jumlah keseluruhan UMKM di DKI Jakarta yang mencapai 1.061.968. Berdasarkan tabel 1.2, Jakarta pusat menempati posisi pertama sebesar 25,39% dari jumlah UMKM binaan Jakpreneur. Melihat hal tersebut, menjadi tanda tanya apakah mereka yang tergabung dengan Jakpreneur berhasil dalam mengembangkan usahanya atau tidak.

Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pelaku UMKM binaan Jakpreneur Jakarta Pusat untuk melihat bagaimana proses program dijalankan. Pemilihan lokus yang didukung berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM)

Provinsi DKI Jakarta yang memperlihatkan jumlah UMKM binaan Jakpreneur di tahun 2022 terbanyak berasal dari wilayah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat sebagai wilayah yang strategis terletak di pusat wilayah DKI Jakarta karena terdapat lokasi kantor pemerintahan dan perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jakarta Pusat sebagai daerah dengan perekonomian terbesar di Provinsi DKI Jakarta sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang untuk mengembangkan usaha. Selain itu belum ada penelitian yang dilakukan di Jakarta Pusat sebagai lokus penelitian. Sehingga peneliti tertarik menjadikan Jakpreneur Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Mariam & Yuliani, 2022) yang menganalisis terkait program Jakpreneur di wilayah Jakarta Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pelaku UMKM binaan Jakpreneur tersebut bahwa ada pengaruh modal, pelatihan, dan teknologi terhadap pendapatan. Pada pelaksanaan Jakpreneur oleh Suku Dinas Jakarta Utara, terdapat permasalahan yang ditemui dalam berjalannya program bagi pelaku UMKM. Permasalahan yang ditemui, yaitu Dinas PPKUKM dinilai masih belum maksimal dalam memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM terkait persyaratan pengajuan bantuan modal. Pelaku UMKM masih kurang antusias dalam mengikuti berbagai program yang dijalankan Jakpreneur. Keterbatasan pelaku UMKM dalam menguasai teknologi yang masih terbatas menjadi hambatan dalam berjalannya program itu. Hal ini mengindikasikan bahwa program Jakpreneur belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaku UMKM terutama dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program Jakpreneur membuat wadah yang mampu mengatasi dan memberikan solusi atas persoalan yang ada. Melalui program ini pemerintah DKI Jakarta menginginkan UMKM mampu untuk terus menjalankan usahanya dan memberikan masyarakat untuk mendirikan dan membangun usahanya sendiri. Pemerintah DKI Jakarta ingin menciptakan UMKM yang mampu berdaya saing dengan kualitas yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Menciptakan UMKM yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, membutuhkan adanya kerjasama K/L, pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pelaku usaha melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pendekatan sektoral mengacu pada beberapa industri yang dapat berkembang melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan *stakeholder* lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian dilakukan kepada pelaku UMKM binaan Jakpreneur di wilayah Jakarta Pusat untuk melihat bagaimana implementasi program Jakpreneur dijalankan. Permasalahan yang didasarkan dari penelitian dan data yang ada menjadi latar belakang belum maksimalnya program Jakpreneur. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan pengalaman yang masih terbatas menjadi hambatan utama pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Wirausaha Jakpreneur masih terbatas dalam strategi pemasaran terutama dalam pemanfaatan teknologi yang saat ini semakin berkembang. Modal yang terbatas turut mendukung keterbatasan pelaku UMKM untuk memperluas usaha yang dimiliki sehingga tidak mampu dalam memaksimalkan penjualan.

Menyikapi permasalahan dalam pengembangan UMKM di DKI Jakarta, peneliti menetapkan Jakarta Pusat sebagai lokus penelitian. Jakpreneur sebagai salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan dalam studi ilmu Administrasi Publik, melalui permasalahan yang sudah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Jakpreneur dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta Pusat”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM oleh Sudin PPKUKM Jakarta Pusat kepada pelaku UMKM di Jakarta Pusat?
- 2) Apa faktor penghambat pada pelaksanaan program Jakpreneur kepada pelaku UMKM di Jakarta Pusat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program Jakpreneur UMKM oleh Suku Dinas PPUKM Jakarta Pusat kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan UMKM.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pada pelaksanaan program Jakpreneur kepada pelaku UMKM di Jakarta Pusat.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses pembelajaran dengan menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga sebagai bahan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terkait dengan topik pembahasan yang sama pada penelitian ini.

2) Kegunaan Praktis :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan berupa penjelasan dasar maupun teori-teori terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengalaman dan kemampuan bagi peneliti terkait Program Jakpreneur.

b. Bagi Pemerintah/Organisasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengembangan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Implementasi Program Pengembangan UMKM		
1.	Alif Salsabila Katya & Saraswati. (2021). Pemerintahan Kolaboratif dalam Peningkatan Daya	Tujuan penelitian untuk mengetahui proses dan bentuk kolaborasi melalui pendekatan	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kolaborasi melalui program Jakpreneur sebagai langkah dalam memperbaiki

	Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Jakpreneur.	collaborative governance pada Program Jakpreneur	pengelolaan UMKM di Jakarta. Kolaborasi dilakukan dengan pihak swasta, kementerian/lembaga, <i>startup</i> , komunitas sipil, perguruan tinggi, dan masyarakat yang sudah dilakukan dengan baik dengan komitmen untuk memberdayakan UMKM. Proses kolaborasi yang melibatkan banyak pihak dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan dari tahapan P1-P7 pada Program Jakpreneur.
2.	Dwi Mirani, Martina, dan Januar Eko Aryansyah. (2021). Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang.	Mengetahui pelaksanaan program pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang.	Pelaksanaan program pembinaan UMKM masih belum berjalan secara optimal yang meliputi kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan modal. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan yang dihadapi selama program dijalankan terkait akses permodalan yang terbatas dan sumber daya manusia yang rendah.
3.	Syaiful Bahri. (2021). Implementasi Program Jakpreneur dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.	Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Jakpreneur, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, dan manfaat program Jakpreneur yang dilakukan oleh Suku Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk dan	Implementasi program Jakpreneur dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Barat melalui pemberian fasilitas 7P (Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan, dan Permodalan). Pelaksanaan program Jakpreneur memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, yaitu meningkatkan potensi dan kepercayaan diri binaan, meningkatkan omset usaha, dan memperbaiki kondisi ekonomi.

4..	Azka Himayatu Dini. (2022). Implementasi Program Jakpreneur pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Priok.	Mengetahui implementasi Program Jakpreneur pada UMKM Binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok	Implementasi program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok dalam pelaksanaannya belum berjalannya dengan maksimal. Terdapat permasalahan yang ditemui, yaitu jumlah pengangguran masih banyak, Kepala pelaksana program di Kecamatan tidak berpedoman pada SOP. Selain itu sosialisasi tidak dilaksanakan dengan baik karena UMKM yang tergabung mengetahui informasi melalui teman.
Efektivitas Program Pengembangan UMKM			
5.	Euis Hasmita Putri. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda).	Mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan UMKM dan mengetahui faktor penghambatnya.	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran penting dalam proses pengembangan UMKM yang dilakukan kepada pelaku UMKM. Adanya faktor penghambat selama proses tersebut, yaitu berupa dana pengadaan pelatihan yang terbatas dan sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga menghambat berjalannya program pengembangan UMKM tersebut.
6.	Ainaa Maulidya Zahra & Novie Indrawati Sagita. (2023). Efektivitas Program Jakarta Enterpreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara.	Menganalisis efektivitas program Jakpreneur dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara	Pelaksanaan program Jakpreneur sudah berjalan dengan baik melalui penyediaan fasilitas pendukung yang memberikan manfaat untuk mengembangkan usaha UMKM. Masih adanya permasalahan yang ditemukan selama program dijalankan yaitu minimnya ketertarikan anak muda bergabung dengan Jakpreneur, produk usaha di Kecamatan Penjaringan belum dapat bersaing dengan produk lainnya, dan permasalahan

			dalam peminjangan modal karena adanya penolakan dari Bank.
	Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM		
7.	Sudjnan & Juwari. (2018). Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan UMKM Dan Koperasi Di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan.	Mengetahui pelaksanaan pendampingan dalam meningkatkan UMKM di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan	Pelaksanaan pendampingan yang diberikan kepada UMKM dan Koperasi di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan dapat membantu meningkatkan potensi yang ada dengan memberikan inovasi dan strategi dalam melakukan penjualan. Selain itu adanya pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk memperoleh dana permodalan dari lembaga keuangan/perbankan.
8.	Hariati, Ikhsan, Dwi Sepriyono Nur. (2019). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur.	Menganalisis upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kalimantan Timur dalam pengembangan UMKM	Dinas PPKUKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan pertumbuhan iklim usaha dalam kegiatan pengembangan UMKM, pembinaan terhadap UMKM, dan pertumbuhan unit usaha baru yang dilakukan dari proses produksi, permodalan, pemasaran, pengembangan SDM, kelembagaan, dan informasi teknologi. Melalui pendorongan ekonomi melalui UMKM
9.	Lara Ayu Lestari, Agnes Dellaneira Spetira, Agustin Rina Herawati, Kismartini. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Penumbuhan Iklim Usaha Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman	Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat.	Kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman untuk penumbuhan iklim usaha berjalan dengan optimal. Pemberdayaan dilakukan dengan pemberian sarana dan prasarana, menerapkan keterbukaan informasi publik dan sistem satu data, pembentukan kemitraan dan forum komunikasi, mempermudah perizinan usaha

			melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), memberikan fasilitas untuk kegiatan promosi sekaligus pemberian biaya untuk sertifikasi HAKI, dan menyediakan tempat usaha.
Faktor yang Mempengaruhi UMKM			
10.	(Wibawa & Dinas Prihardini. (2018) <i>Analysis of Human Resource Competency as Effort to Increase SMEs Economic Sector Productivity with Gender as Differentiating Variable.</i>	Melakukan analisis terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Pangkalpinang.	Kompetensi SDM yang meliputi pengetahuan, kemampuan, sikap, dan keterampilan memiliki pengaruh terhadap berjalannya UMKM dan mampu meningkatkan produktivitas UMKM.
11.	Siti Mariam & Findy Yuliani. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara (Studi Kasus Binaan Jakpreneur)	Menguji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Hasil penelitian menunjukkan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap pendapatan UMKM. Pada pelaksanaan Jakpreneur di Kecamatan Tanjung, pelaku usaha masih banyak mendapatkan permasalahan terkait bantuan modal yang sulit didapat. Selain itu keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang masih kurang aktif dan kemampuan dalam penggunaan teknologi masih minim.

Penelitian terkait dengan pengembangan UMKM sudah cukup banyak dilakukan di daerah yang berbeda di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Penelitian ini memiliki lokus yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu di Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Fokus penelitian ini yang membahas implementasi sistem pada kegiatan yang dijalankan pada Proram

Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat kepada para pelaku UMKM. Selain itu penelitian juga menganalisis hambatan selama program Jakpreneur dijalankan oleh pihak Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat.

1.5.2. Paradigma Administrasi Publik

1) Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 – 1927)

Dikotomi Politik dan Administrasi yang ditokohi oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Mereka mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi berbeda, yaitu mengenai fungsi politik dan fungsi administrasi (Keban, 2004) :

- a) Fungsi Politik: Pemerintah yang harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi kepada kehendak rakyat.
- b) Fungsi Administrasi: Pemerintah memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

Fungsi politik dan administrasi yang dipisahkan dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif mewakili kehendak rakyat, badan eksekutif melaksanakannya, dan badan yudikatif membantu legislatif menetapkan tujuan dan membuat kebijakan. Ini menunjukkan perbedaan antara fungsi politik dan administrasi. Administrasi publik yang harus berpusat pada birokrasi pemerintah atau *government bureaucracy* sebagai lokusnya, sedangkan dengan fokus pada paradigma ini kurang dibahas secara lebih rinci.

2) Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi yang ditokohi oleh Willoughby, Gullick & Unwick yang juga dipengaruhi oleh tokoh manajemen klasik seperti

Fayol dan Taylor. Paradigma ini memiliki focus administrasi publik, yaitu prinsip-prinsip administrasi yang dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang dapat diterapkan di mana saja (Keban, 2004), sedangkan lokus dalam administrasi publik pada paradigma ini tidak dijelaskan dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi dapat disebut kebalikan dari isi pada paradigma pertama yang memiliki lokus namun tidak jelas dengan fokusnya, sedangkan dalam prinsip-prinsip administrasi memiliki fokus namun lokus tidak dijelaskan lebih rinci.

3) Paradigma 3 : Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik yang pada intinya yang pada dasarnya menggabungkan administrasi publik ke dalam ilmu politik. Herbert Simon menyatakan bahwa paradigma prinsip administrasi tidak konsisten dan tidak berlaku secara universal. Pada akhirnya, paradigma baru muncul, yaitu administrasi publik sebagai ilmu politik. Mereka berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tetap sama, dan fokusnya menjadi kabur karena kelemahan prinsip administrasi publik (Keban, 2004). Namun, mereka yang melakukan kritik terhadap prinsip administrasi tidak memberikan solusi yang relevan untuk administrasi publik. Pada intinya segala permasalahan atau persoalan baik itu dari sektor formal maupun informal dengan melakukan penyelesaian berada di administrasi publik karena memiliki kewenangan yang besar.

4) Paradigma 4 : Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi menjelaskan tentang prinsip manajemen dikembangkan lebih mendalam dari yang sudah populer sebelumnya. Ilmu administrasi sebagai sebuah paradigma hanya memberikan fokus tetapi tidak dengan lokus. Menawarkan sebuah teknik yang membutuhkan adanya keahlian juga spesialisasi, namun keahlian yang harus diterapkan tidak dapat didefinisikan dalam pengaturan kelembagaan. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti halnya metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan lainnya itu yang menjadi fokus dari paradigma ini. Terdapat 2 (dua) arah dalam perkembangan yang terjadi di paradigma ini, yaitu:

- a) Berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial.
- b) Berorientasi pada kebijakan publik (Keban, 2004).

Fokus yang terdapat didalam paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi dikembangkan dengan diasumsikan dapat diterapkan yang tidak hanya dalam dunia bisnis saja namun juga dalam dunia administrasi publik. Oleh karena itu, dalam paradigma ini menjadi tidak jelas.

5) Paradigma 5 : Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970 – sekarang)

Paradigma ke-5 yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas dibanding paradigma sebelumnya. Penggambaran lokus dari bidang studi ini menunjukkan adanya kemajuan.

Selain itu penentuan apa relevansi kepentingan umum, urusan umum dan "penentuan kebijakan umum" bagi para ahli administrasi. Meskipun demikian, bidang ini menemukan bahwa ada beberapa elemen sosial penting yang unik bagi negara terbelakang yang digunakan sebagai lokusnya. Fokus dan lokus yang terdapat di dalam paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, yaitu:

- a) Fokus Administrasi Publik: Teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik.
- b) Lokus Administrasi Publik: Masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik, urusan publik, dan kebijakan publik (Keban, 2004).

Administrasi publik yang mulai menemukan fokus dan lokus yang sesuai dengan arahnya. Teori organisasi yang mengarah terhadap bagaimana atau mengapa, bukan dari segi seharusnya dan teknik manajemen. Fokus administrasi publik yang mengarah terhadap perilaku organisasi juga perilaku anggota organisasi publik, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan etika, masalah publik, dan kepentingan publik (Aneta, 2012).

6) Paradigma 6 : Governance (1990 – sekarang)

Paradigma ke-6, yaitu *Governance* yang berhubungan dengan pemerintahan. Paradigma yang sudah ada pada tahun 1990-an ini berkolaborasi antara negara, sektor bisnis, dan masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingan publik. Kolaborasi menjadi peranan penting yang dilakukan pemerintah dengan pihak lain baik swasta, masyarakat sipil, atau penyedia layanan. Tata kelola pemerintahan dibutuhkan adanya kerjasama

dan kolaborasi untuk saling melengkapi dan saling mendukung (Gedeona, 2010). Perlu adanya partisipasi dari berbagai elemen baik swasta maupun masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang baik. Artinya dalam paradigma *governance* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor bukan menjadi aktor utama dalam menjalankan sistem pemerintahan. Peranan dari setiap lembaga dalam paradigma *governance*, yaitu (Gedeona, 2010):

1. Negara (*state*): Peranan yang diharapkan agar berorientasi terhadap pengembangan SDM yang berkualitas dengan mengintegrasikan upaya tersebut dengan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Melakukan penyelenggaraan administrasi dengan menyediakan infrastruktur, melakukan desentralisasi, dan meningkatkan administrasi pemerintah.
2. Swasta (*private sector*): Berperan dalam menciptakan kondisi pasar yang aman dan kondusif dalam melakukan akses jual beli produksi barang dan jasa. Hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan yang akan dilakukan kepada masyarakat agar tingkat kesejahteraan yang diperoleh lebih terjamin.
3. Masyarakat (*civil society*): Mampu untuk mengelola juga mengurus segala permasalahan yang ada sehingga dapat membuat pemerintah dan swasta tidak harus menyelesaikannya secara langsung. Selain itu masyarakat diharapkan untuk membentuk organisasi masyarakat sipil yang bertujuan

untuk menyalurkan partisipasi publik yang dapat mempengaruhi dalam proses kebijakan publik.

Perkembangan paradigma dari tahun ke tahun yang dianalisis oleh para tokoh menyesuaikan bagaimana kegunaan dan penempatan yang sesuai dengan administrasi publik. Fokus dan lokus yang terus dikembangkan agar sesuai dengan kondisi dan kegunaan dari ilmu administrasi publik. Paradigma ke-6 yang sudah menjadi pelengkap dan langkah paling tepat dalam pelaksanaan proses administrasi.

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pengembangan UMKM. Peran serta Suku Dinas sebagai pemerintah pemberi layanan dengan melakukan kolaborasi dengan pihak swasta untuk pengembangan pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Paradigma ke-6 Ilmu Administrasi Publik, pemerintah tidak berperan sebagai aktor utama dengan melakukan kolaborasi bersama pihak swasta dan masyarakat. Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat melakukan pengembangan usaha melalui dukungan kelembagaan dapat dipengaruhi dari faktor internal maupun eksternal yang dapat ditunjang melalui pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri yang dapat menilai kinerja yang sudah dilakukan. Ketepatan kontribusi yang dilakukan antara tiga lembaga yang memiliki peranan masing-masing dalam memberikan kontribusinya terhadap pelayanan publik yang akan dilakukan.

1.5.3. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah aturan yang diberikan dan diatur oleh pemerintah dalam mengelola suatu wilayah yang dipimpin. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah keputusan strategis yang mengikat bagi orang banyak yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik harus dibuat oleh seseorang yang telah menerima mandat publik yang dilakukan melalui proses pemilihan. Selain itu, administrasi negara yang dipimpin oleh birokrasi pemerintah, akan melaksanakan kebijakan publik.

Kebijakan publik secara garis besar terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Anggara, 2018). Thomas Dye (dalam Anggara, 2018) mendefinisikan kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah. Sedangkan James E. Anderson (Taufiqurokhman, 2014) menjelaskan kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau sekelompok pelaku atau pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan guna memecahkan masalah.

Pressman dan Wildavsky (1973) (dalam Kasmad, 2013) menjelaskan implementasi sebagai suatu proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan. Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2018) menjelaskan konsep implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang memiliki tujuan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan pada kebijakan. Van meter dan Van Horn (Anggara, 2018) menjabarkan variabel yang harus diperhatikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tujuan kebijakan dan standar sasaran program yang akan dicapai melalui kebijakan untuk mengukur pencapaian.
2. Sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi.
3. Kualitas hubungan interorganisasional yang menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan.
4. Karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
5. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan bentuk dukungan, karakteristik para partisipan, dan bagaimana tanggapan publik terhadap kebijakan yang dibuat.
6. Disposisi atau sikap dari pelaksana yang mencakup pemahaman dan pengetahuan dari isi dan tujuan kebijakan, sikap atas implementasi kebijakan.

Kebijakan memiliki 5 unsur dalam pelaksanaannya, yaitu: 1. Tujuan; 2. Rencana; 3. Program; 4. Keputusan; 5. Efek atau dampak (Taufiqurokhman, 2014)). Elemen dalam sistem kebijakan perlu memperhatikan beberapa hal penting selama pelaksanaannya. Dunn (dalam Anggara, 2018) merumuskan terdapat tiga elemen penting dalam sistem kebijakan, yaitu:

1. Lingkungan kebijakan (*policy environments*) atau kondisi yang melatarbelakangi timbulnya sesuatu, dalam hal ini masalah kebijakan.

2. Kebijakan publik (*public policy*), yaitu keputusan atas beberapa pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dibuat oleh badan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
3. Pelaku kebijakan (*policy stakeholder*), yaitu individu maupun sekelompok yang mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh adanya keputusan yang dibuat oleh badan pemerintah.

Pada penelitian ini lingkungan kebijakan yang menjadi isu permasalahan dari kebijakan yang dibuat, yaitu adanya permasalahan perekonomian dari masyarakat dalam bidang usaha. Masyarakat yang masih kesulitan dalam menjalankan usahanya karena masih adanya permasalahan dan hambatan yang dialami. Kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas membuat wirausaha tidak bisa memaksimalkan penjualan. Oleh sebab itu, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu membuat Program Jakpreneur atau Jakarta *Entrepreneur*. Pelaku kebijakan atau sasaran dari adanya program ini bagi masyarakat DKI Jakarta maupun non DKI Jakarta tetapi yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang memiliki usaha. Selain itu penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu tujuan dan standar sasaran program, sumber daya, dan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi.

1.5.4. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Hasibuan (2004) (dalam Adamy, 2016) menjelaskan pengembangan adalah cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan secara teknis, konseptual, moral, dan teoritis karyawan. Pengembangan diberikan sesuai dengan apa yang

dibutuhkan oleh seseorang berdasarkan pekerjaan atau jabatan yang diperoleh melalui pelatihan maupun pendidikan. Sedangkan UMKM menurut Tambunan (2012:22) (dalam Riza, 2021) adalah unit usaha produktif yang didirikan perseorangan dan dijalankan secara perorangan maupun kelompok di berbagai bidang ekonomi. UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang memberikan peluang dalam memperluas lapangan kerja sekaligus memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat (Hastuti et al., 2020)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki peran dalam membangun perekonomian nasional dengan mengembangkan usahanya. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu peran penting sebagai dorongan untuk program pembangunan nasional melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Peranan pemerintah dalam peningkatan iklim usaha yang sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yaitu terkait dengan (1) pendanaan; (2) sarana dan prasarana; (3) informasi usaha; (4) kemitraan; (5) perizinan usaha; (6) kesempatan berusaha; (7) promosi dagang; dan (8) dukungan kelembagaan. Peran serta pemerintah dalam pengembangan UMKM memiliki posisi yang penting untuk meningkatkan iklim usaha. Fajar (2016) mengatakan faktor yang mendukung penumbuhan iklim usaha, yaitu :

1) Pendanaan

Faktor pendanaan sebagai pendukung modal usaha adalah elemen penting dalam UMKM. Modal merupakan kelemahan klasik bagi para pelaku usaha terutama UMKM.

2) Sarana dan Prasana

Sarana dan prasana seperti lokasi usaha dapat diberikan keringanan dan kemudahan oleh pemerintah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kepastian karena masih adanya pelaku usaha yang mengalami penggusuran lahan.

3) Informasi Usaha

Informasi usaha berperan sebagai jembatan bagi pelaku usaha dalam mengetahui kondisi pasar dan jangkauan pasar. Perkembangan teknologi yang semakin maju mengharuskan pelaku usaha untuk lebih aktif dalam memperluas jangkauan dengan peluang yang ada.

4) Kemitraan

Kemitraan menjadi fokus pemerintah dalam mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan bagi pelaku UMKM. Bentuk kemitraan dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi monopoli sekaligus mendorong terbentuknya struktur pasar.

5) Perizinan Usaha

Perizinan usaha adalah hambatan yang sering dialami oleh para pelaku usaha. Pemerintah memiliki peran dalam melakukan penyederhanaan proses perizinan usaha dengan tata cara yang mudah melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Perizinan usaha yang diberikan kepada pelaku usaha dilakukan secara gartis atau pembebasan biaya perizinan.

6) Kesempatan Berusaha

Kesempatan berusaha dilakukan dengan memberikan kebijakan terkait penetapan alokasi wilayah untuk tempat usaha. Pemerintah memberikan gambaran jenis kegiatan UMKM dan bidang usaha yang terbuka.

7) Promosi Dagang

Kegiatan promosi sebagai aspek penting dalam pengembangan UMKM namun sekaligus menjadi hambatan. Peran serta pemerintah sangat diperlukan dalam perluasan UMKM baik secara langsung atau pemberian fasilitas promosi secara mandiri.

8) Dukungan Kelembagaan

Kelembagaan sangat berperan penting bagi pelaku UMKM agar mempermudah dalam peningkatan usaha. Adapaun upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam kegiatan pengembangan UMKM, yaitu dalam bidang (a) produksi; (b) pemasaran; (c) sumber daya manusia; dan (d) teknologi dan pemberian fasilitas perizinan.

Dari 8 faktor pengembangan UMKM tersebut, Program Jakpreneur berperan sebagai dukungan kelembangan. Jakpreneur berperan dalam mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan nilai usaha dengan berbagai kegiatan yang dijalankan. Program yang telah dijalankan sejak tahun 2017 diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha melalui kegiatan yang dilakukan.

1.6. Operasional Konsep

Secara konseptual penelitian ini membahas Pengembangan UMKM Melalui Program Jakpreneur di Jakarta Pusat menggunakan teori pengembangan UMKM yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memfokuskan pada dukungan kelembagaan.

Pelaksanaan program Jakpreneur merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan UMKM kepada wirausaha. Proses dukungan kelembagaan ditujukan kepada wirausaha dalam pengembangan UMKM untuk mendukung meningkatnya kualitas pelaku usaha.

1.6.1. Implementasi Program Jakpreneur dalam Pengembangan UMKM oleh Suku Dinas PPUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat

1.6.1.1 Standar, Tujuan, dan Sasaran Program

Pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur membutuhkan adanya kerjasama dari pemerintah maupun masyarakat sebagai sasaran utama. Program Jakpreneur berlandaskan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Pada peraturan yang mengatur tentang standar pelaksanaan Program Jakpreneur serta sasaran dan tujuan program. Program Jakpreneur memiliki kegiatan utama, yaitu berupa Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan keuangan, dan Permodalan. Fokus pada penelitian ini mengarah pada implementasi program Jakpreneur sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

1. Standar program

Standar dalam program Jakpreneur menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang standar pelaksanaan Program Jakpreneur, syarat untuk bergabung anggota Jakpreneur, perencanaan, pendampingan, dan pengawasan program. Standar program harus disusun dengan

jelas untuk berjalannya program agar dapat mengetahui keberhasilan pelaksanaan program melalui pengawasan dan perencanaan program.

2. Tujuan Program

Tujuan program yang tercantum pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan apa saja target yang harus dicapai pada Program Jakpreneur. Gejala yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tujuan yang ingin dicapai berdasarkan target pada Program Jakpreneur, dan pengetahuan pegawai dalam memahami dan mengetahui tujuan yang harus dicapai.

3. Sasaran dan Penyelenggaraan Program

Sasaran dan penyelenggaraan program Jakpreneur tercantum pada Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Sasaran dan penyelenggaraan pada pengembangan UMKM merupakan bagian dalam berjalannya program yang melibatkan beberapa pihak. Sasaran dari program ini, yaitu wirausaha pemula, wirausaha naik kelas dan pencari kerja yang bertempat tinggal di DKI Jakarta. Gejala yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kesesuaian UMKM dengan target program
- b. Penanggung jawab penyelenggaraan program
- b. Pengetahuan kelompok sasaran program

1.6.1.2 Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya kebijakan yang meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Pelaksanaan program memerlukan adanya sumber pendanaan untuk menjalankan kegiatan yang akan diselenggarakan. Dukungan kelembagaan menjadi sumber daya yang akan mendorong pelaksanaan program kepada pelaku

UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai program yang diselenggarakan.

1. Anggaran Program

Anggaran atau insentif yang akan memfasilitasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Jakpreneur. Sumber pendanaan yang disediakan apakah mampu memenuhi seluruh kegiatan Program Jakpreneur yang dilakukan

2. Dukungan Kelembagaan

Proses dukungan kelembagaan ditujukan kepada wirausaha dalam pengembangan UMKM yang berdasarkan Permenkop dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kegiatan pengembangan UMKM melalui Jakpreneur diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat melalui proses sosialisasi. Adapun gejala yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Pemasaran
2. Sumber Daya Manusia
3. Teknologi dan Pemberian Fasilitas Perizinan

1.6.2. Faktor Penghambat pada pelaksanaan Program Jakpreneur oleh Suku

Dinas PPUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (Hanim & Noorman, 2018) menyebutkan terdapat faktor penghambat dalam pengembangan UMKM yaitu dari sisi sumber daya manusia dan peran *stakeholder* program belum berjalan dengan baik. Sumber daya manusia dalam hal ini pelaku usaha memiliki peranan penting

dalam berjalannya program. Pengembangan UMKM yang dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha harus memperhatikan kebutuhan sumber daya yang diperlukan.

1.6.2.1 Latar Belakang Pelaku Usaha

Kondisi sosial dan ekonomi wirausaha menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya usaha. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi karena perekonomian yang tidak stabil. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas masyarakat apabila nantinya akan mendirikan usaha. Perekonomian yang tidak stabil menyebabkan wirausaha sulit untuk mengembangkan usaha karena terkendala modal usaha. Adapun gejala yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang masih minim pengalaman menentukan kualitas pelaku usaha. Pengalaman pelaku UMKM dalam menjalankan usaha yang masih terbatas menyebabkan terhambatnya pengembangan usaha. Informasi terkait usaha yang hanya didapatkan dari pengalaman pribadi berdampak pada keterbatasan mengelola bisnis.

2. Modal

Kondisi ekonomi wirausaha yang masih banyak dihadapi UMKM menyebabkan sulit untuk mengembangkan usaha. Proses administratif yang dialami pelaku usaha dalam mengelola modal untuk proses kegiatan usaha masih terbatas. Pengembangan usaha perlu adanya modal untuk kegiatan operasional usaha yang dapat mendorong kegiatan pengembangan usaha.

3. Sarana dan prasarana

Proses pengembangan usaha tidak hanya membutuhkan modal tetapi juga sarana dan prasarana. Perubahan zaman membuat pelaku usaha dipaksa untuk mengikuti pasar agar dapat bertahan dan bersaing dengan wirausaha lain.

1.6.2.2 Peran *Stakeholder*

Stakeholders berperan dalam keberlangsungan program yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masih adanya permasalahan selama berjalannya program yang dijalankan perlu adanya evaluasi untuk keberlangsungan program ke depannya. Adapun gejala dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pegawai melaksanakan program kepada UMKM sebagai proses pendampingan pemberdayaan. Kualitas pegawai perlu diperhatikan karena menentukan berhasil tidaknya keberlangsungan program yang dijalankan. Sumber daya manusia yang masih minim karena kurangnya perhatian pada kualitas masing-masing pegawai.

2. Koordinasi antar *stakeholder* UMKM

Kegiatan atau program banyak dijalankan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha terutama UMKM dalam mengembangkan usaha. Koordinasi antar *stakeholder* merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam berjalannya program yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.7. Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi jawaban sesuai dengan teori yang terdapat pada literatur dan dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Pada penelitian ini

yaitu melalui Program Jakpreneur menjadi upaya dalam menyelesaikan permasalahan terkait UMKM. Program ini dapat menjadi alternatif bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan terutama terkait proses pelatihan, pemasaran, dan pemberian fasilitas permodalan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang sering menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin & Lincoln (1994) (dalam Anggito & Setiawan, 2018) mengatakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai metode. Penelitian kualitatif menghasilkan data dalam bentuk deskriptif seperti tulisan dan tingkah laku subjek dan objek dapat diamati. Data yang akan menjadi acuan dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai kunci utama dalam proses penelitian untuk mengetahui lebih dalam dan mencari informasi untuk mampu menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat dan UMKM binaan Jakpreneur di kawasan

Jakarta Pusat. Peneliti memilih lokasi penelitian karena jumlah UMKM dan jumlah UMKM binaan Jakpreneur di kawasan Jakarta Pusat terbanyak sebesar 25,39% dari jumlah UMKM binaan Jakpreneur di DKI Jakarta, sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan terjadi pertumbuhan wirausaha di DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,69%.

1.8.3. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian berdasarkan judul penelitian yaitu tentang Implementasi Program Jakpreneur Sebagai Upaya dalam Pengembangan UMKM di Jakarta Pusat. Maka subjek penelitian adalah pemerintah dan masyarakat pelaku UMKM. Pemilihan subjek penelitian didasarkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang didasarkan pada penguasaan terhadap informasi dan permasalahan untuk dapat menjawab dan melengkapi penelitian. (Sugiyono, 2015) menjelaskan teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan menetapkan standar dan kriteria yang cocok untuk penelitian tersebut.

Subjek pada penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jakarta Pusat. Peneliti menggunakan 3 informan kunci untuk memperoleh data kualitatif, yaitu:

1. Kepala Subbagian Koperasi dan UKM Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Pegawai Subbagian Koperasi dan UKM Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3. Pegawai PJLP sebagai pendamping lapangan Subbagian Koperasi dan UKM Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat

Informan kunci yang terpilih karena kedua informan yang memahami proses diselenggarakannya program Jakpreneur. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini, yaitu dari pelaku UMKM binaan Jakpreneur di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 5 UMKM.

1.8.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan teks atau kata-kata tertulis untuk mendeskripsikan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Program Jakpreneur di Jakarta Pusat dan faktor dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peneliti memperoleh data yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.8.5. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data primer pada suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya melalui proses pengukuran, menghitung dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain-lain (Hardani, 2020). Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu dengan melakukan wawancara yang berhubungan dengan pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur Jakarta Pusat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pemanfaatan media perantara atau diperoleh pihak lain. Menurut David E. Gray (2009:501) (dalam Effendi & Tukiran, 2012) menjelaskan analisis data sekunder adalah kegiatan yang dilakukan untuk interpretasi dan penarikan kesimpulan atau dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tambahan dengan pengumpulan serta analisis data sebelumnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari arsip yang dimiliki instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, *website* resmi, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi menurut Sukmadinata (2005) (dalam Hardani, 2020) adalah proses pengamatan melalui teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian, aktivitas yang sedang berlangsung, dan orang yang terlibat. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat dan UMKM

binaan Jakpreneur di Jakarta Pusat. Observasi dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan program Jakpreneur dan faktor penghambat UMKM.

2. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (1999) (dalam Hardani, 2020:163) adalah proses dalam mendapatkan keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari sumber pertama, pelengkap teknik pengumpulan, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Suku Dinas dan Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat, Pegawai Suku Dinas dan Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat, dan pelaku UMKM Jakpreneur di Jakarta Pusat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan mempelajari dokumen yang mendukung penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2015) mengatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mengolah data yang telah terkumpul. Penelitian ini dalam mengelola data dengan melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) (dalam Hardani, 2020:163) dengan 3 komponen, yaitu:

1. Reduksi data

Kegiatan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari data lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian yang dimaksud dengan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Analisis dilakukan secara mendalam dengan menggolongkan data, menghubungkannya kepada teori, dokumen/literatur serta hasil penelitian yang relevan pada setiap bagian pembahasan. Melalui penyajian data dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian dilakukan analisis lanjutan untuk penarikan simpulan. Simpulan adalah intisari dan gambaran dari temuan penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya. Simpulan dibuat harus relevan dan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian.

1.8.8. Kualitas Data

Pada penelitian kualitatif mengutamakan subjek penelitian untuk mencapai kesesuaian antara beberapa sumber informasi Hardani (2020:46). Penelitian ini

menggunakan triangulasi sebagai penentu kualitas data. Triangulasi pada pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Moleong (2017:332) mengatakan mengenai konsep triangulasi bahwa triangulasi membandingkan dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan pembuktian pada data yang sudah tersedia yang bertujuan untuk memperkuat keputusan berdasarkan pada bukti data yang tersedia. Peneliti melakukan pengumpulan berbagai sumber data dengan teknik yang sama melalui wawancara dengan narasumber terkait tujuan penelitian.